

---

**RINGKASAN**  
**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**  
**TAHUN 2018**

Berdasarkan ketentuan Pasal 69 ayat (1) dan Pasal 70 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Gubernur wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah mencakup laporan kinerja instansi Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2018, Tugas Pembantuan dan Tugas Umum Pemerintahan.

LPPD diawali dengan menggambarkan kondisi geografis, demografi dan perekonomian di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018, dengan jumlah penduduk sebanyak 34.490.835 jiwa (sumber data : Data Penduduk se Jawa Tengah Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan). Jumlah penduduk terbanyak terdapat di Kabupaten Brebes sebanyak 1.802.829 jiwa dan jumlah penduduk paling sedikit berada di Kota Magelang sebanyak 121.872 jiwa.

Perekonomian Jawa Tengah Tahun 2018 didominasi oleh dua sektor lapangan usaha, yaitu: industri pengolahan dan pertanian, kehutanan, dan perikanan. Lapangan usaha industri pengolahan tahun 2018 tumbuh 4,35%, menguat 0,02 poin dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh 4,33%. Sementara lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan tumbuh 2,63%, menguat 0,97 poin dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh 1,66%.

Untuk pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah Tahun 2018 sebesar 5,32% meningkat dari tahun 2017, yaitu 5,26%. Sedangkan laju inflasi Tahun 2018 sebesar 3,13% lebih rendah dibanding laju inflasi Tahun 2017 yaitu 3,61%. PDRB per kapita Jawa Tengah atas dasar harga berlaku pada Tahun 2018 sebesar Rp36,78 juta meningkat sebesar 7,48% dibanding PDRB per kapita Tahun 2017 sebesar Rp34,22 juta.

**A. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH**

Visi pembangunan daerah Jawa Tengah dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 – 2018 yaitu: **MENUJU JAWA TENGAH SEJAHTERA DAN BERDIKARI “Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi”**

Strategi dan arah kebijakan untuk mewujudkan visi pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 maka dirumuskan strategi dan arah kebijakan kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang menurut misi sebagai berikut :

1. Membangun Jawa Tengah berbasis Trisakti Bung Karno, Berdaulat di Bidang Politik, Berdikari di Bidang Ekonomi dan Berkepribadian di Bidang Kebudayaan.
2. Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat yang Berkeadilan, Menanggulangi Kemiskinan dan Pengangguran.
3. Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah yang Bersih, Jujur dan Transparan, "*Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi*"
4. Memperkuat Kelembagaan Sosial Masyarakat untuk Meningkatkan Persatuan dan Kesatuan.
5. Memperkuat Partisipasi Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan dan Proses Pembangunan yang Menyangkut Hajat Hidup Orang Banyak.
6. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik untuk Memenuhi Kebutuhan Dasar Masyarakat.
7. Meningkatkan Infrastruktur untuk Mempercepat Pembangunan Jawa Tengah yang Berkelanjutan dan Ramah Lingkungan.

Prioritas dan fokus sasaran pembangunan Jawa Tengah yang ditujukan untuk meningkatkan ketahanan pangan dan energi berkelanjutan serta percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan kemandirian wilayah, meliputi :

1. Peningkatan ketahanan pangan dan energi melalui pembangunan pertanian dalam arti luas serta pengembangan dan pemanfaatan energi secara berkelanjutan;
2. Percepatan penanggulangan kemiskinan secara terpadu melalui pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin, peningkatan pendapatan masyarakat miskin serta pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, petani, dan nelayan;
3. Peningkatan kualitas dan kompetensi sumber daya manusia diberbagai bidang dan layanan sosial dasar masyarakat secara berkelanjutan;
4. Penguatan potensi ekonomi kerakyatan berbasis komoditas lokal, industri kreatif dan sentra/klaster dalam rangka percepatan pengurangan pengangguran;
5. Pemantapan pembangunan infrastruktur dengan memperhatikan keberlanjutan sumberdaya alam dan lingkungan hidup;
6. Pemantapan implementasi reformasi birokrasi menuju penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik.

## B. URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN

Urusan LPPD Tahun 2018 mencakup (a) ringkasan urusan desentralisasi yang meliputi anggaran belanja, realisasi dan pelaksanaan urusan wajib dan pilihan serta satuan kerja perangkat daerah pelaksana; (b) prioritas urusan wajib yang dilaksanakan; (c) prioritas urusan pilihan yang dilaksanakan; serta (d) Indikator kinerja kunci yang meliputi tataran pengambil kebijakan serta tataran pelaksana kebijakan.

### 1. Ringkasan Urusan Pemerintahan Konkuren meliputi :

#### a. Pendapatan

Pendapatan Daerah merupakan seluruh hak daerah sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Kebijakan pendapatan daerah Provinsi Jawa Tengah pada Tahun Anggaran 2018 antara lain optimalisasi pungutan PAD, peningkatan keterampilan dan pengetahuan serta profesionalisme aparatur, peningkatan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka optimalisasi penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak, peningkatan sinergitas dengan mitra (Kepolisian RI dan Kanwil Bea Cukai) dalam pemungutan pajak daerah, optimalisasi pemberdayaan aset daerah, peningkatan kualitas manajemen aset daerah, dan optimalisasi BUMD.

Kebijakan dimaksud diimplementasikan melalui peningkatan kualitas pelayanan publik secara akuntabel dibidang perpajakan, retribusi daerah dan pendapatan lain-lain; inventarisasi dan optimalisasi pendayagunaan aset-aset daerah sehingga mampu memberikan kontribusi pendapatan asli daerah serta penajaman potensi riil sumber-sumber pendapatan.

Target Pendapatan Daerah TA. 2018 sejumlah Rp24.815.550.076.000,00 terealisasi sejumlah Rp24.837.095.411.031,00 atau 100,09% dari target. Realisasi pendapatan daerah mengalami kenaikan sejumlah Rp1.133.920.779.524,00 atau 4,57% apabila dibandingkan dengan realisasi pendapatan daerah TA. 2017 sejumlah 23.703.174.631.507,00.

#### b. Belanja

Kebijakan belanja daerah Tahun Anggaran 2017 diarahkan untuk mendukung program/kegiatan strategis daerah dan nasional yang memiliki kontribusi terhadap capaian RPJMD melalui sinergitas rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah.

Kebijakan belanja daerah dilaksanakan melalui pendekatan anggaran berbasis

kinerja dengan memperhatikan prioritas dan program strategis pembangunan secara selektif, akuntabel dan transparan.

Anggaran Belanja Daerah sejumlah Rp26.186.587.329.000,00 terealisasi Rp24.660.589.888.921,00 atau 94,17%. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya sejumlah Rp22.884.713.018.754,00, maka terdapat kenaikan sejumlah Rp1.775.876.870.167,00 atau 7,76%.

Pada pelaksanaan urusan konkuren Pemerintahan, Belanja Daerah terbagi dalam belanja urusan wajib dan urusan pilihan sebagai berikut:

### **1) Urusan Wajib**

Realisasi belanja urusan wajib Rp15.978.742.424.674,00 dari anggaran Rp17.152.678.227.000,00.

### **2) Urusan Pilihan**

Realisasi belanja urusan pilihan Rp.684.392.358.438,00 dari anggaran Rp.748.150.626.000,00.

### **3) Fungsi Penunjang**

Realisasi fungsi penunjang Rp.7.198.006.257.987,00 dari anggaran Rp.7.399.176.827.000,00.

#### **c. Pembiayaan**

Penerimaan pembiayaan pada Tahun Anggaran 2018 diarahkan untuk menutup defisit anggaran yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2017. Penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran 2018 dianggarkan sejumlah Rp1.511.037.253.000,00 terealisasi sejumlah Rp1.511.249.666.433,00 atau 100,01%. Realisasi penerimaan pembiayaan daerah mengalami kenaikan sejumlah Rp864.674.026.678,00 atau 133,73% apabila dibandingkan dengan realisasi penerimaan pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2017 sejumlah Rp646.575.639.755,00.

Pengeluaran pembiayaan pada Tahun Anggaran 2018 diarahkan untuk penyertaan modal dan pembentukan dana cadangan dalam rangka Pilkada Gubernur. Anggaran Pengeluaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2018 sejumlah Rp140.000.000.000,00 terealisasi Rp140.000.000.000,00 atau 100%. Realisasi pengeluaran pembiayaan daerah mengalami penurunan Rp164.000.000.000,00 atau 53,95% apabila dibandingkan dengan realisasi pengeluaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2017 sejumlah Rp304.000.000.000,00.

d. Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sebagai implementasi dari Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah, pada tahun 2016 Pemprov Jawa Tengah telah melakukan penataan SOTK perangkat Daerah, yaitu ditetapkannya Peraturan Gubernur Nomor : 54 s.d 93 Tahun 2016 yang terkait dengan SOTK Perangkat Prov. Jateng sebanyak 48 unit yang terdiri dari 8 Biro, 22 unit Dinas, 7 unit Badan, - unit Kantor, 7 unit Rumah Sakit, 4 unit lembaga daerah lainnya (termasuk Sekretariat DPRD dan Inspektorat).

2. Prioritas Urusan Wajib yang Dilaksanakan meliputi : Program dan Kegiatan, tingkat pencapaian standar pelayanan minimal, SKPD penyelenggara urusan wajib, jumlah pegawai, kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan, jumlah pejabat struktural dan fungsional, alokasi dan realisasi anggaran, proses perencanaan pembangunan, kondisi sarana dan prasarana yang digunakan (lengkap, kurang, mencukupi atau lainnya), permasalahan dan solusi, dan hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan.
3. Prioritas Urusan Pilihan yang dilaksanakan meliputi : Program dan Kegiatan, realisasi program dan kegiatan, tingkat pencapaian standar pelayanan minimal, SKPD penyelenggara urusan pilihan, jumlah pegawai, kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan, jumlah pejabat struktural dan fungsional, alokasi dan realisasi anggaran, proses perencanaan pembangunan, kondisi sarana dan prasarana yang digunakan (lengkap, kurang, mencukupi atau lainnya), permasalahan dan solusi, dan hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan.
4. Indikator Kinerja Kunci meliputi : tataran pengambil kebijakan, tataran pelaksanakebijakan (8 aspek) administrasi umum, dan tataran pelaksana kebijakan aspek tingkat capaian kinerja urusan wajib dan pilihan.
5. Berdasarkan data yang disajikan dalam LPPD tahun 2018 pada umumnya cukup baik namun masih banyak data yang harus disempurnakan, sehingga perlu dilakukan perbaikan-perbaikan elemen data melalui evaluasi mandiri untuk mendapatkan data yang *valid* dan akurat.
6. Perkembangan nilai IKK dalam penyusunan LPPD dari tahun 2017 sampai tahun 2018 dari seluruh lampiran berjumlah 794 IKK dengan indikator pengukuran (meningkat/baik, tetap, menurun) diperoleh hasil sebagai berikut :
  - a. Lampiran 1.1. Tataran Pengambil Kebijakan berjumlah 40 IKK

Ukuran	Jumlah IKK	%
• Meningkat/baik	13	32,50
• tetap	21	52,50

• Menurun	6	15,00
jumlah	40	100,00

## b. Lampiran 1.2. Pelaksanaan Kebijakan berjumlah 672 IKK

Ukuran	Jumlah IKK	%
• Meningkatkan/Naik	86	12,80
• tetap	452	67,26
• Menurun	134	19,94
jumlah	672	100,00

## c. Lampiran 1.3. Capaian Urusan Wajib dan Pilihan 82 IKK

Ukuran	Jumlah IKK	%
• Meningkatkan/Naik	36	43,90
• tetap	29	35,37
• Menurun	17	20,73
jumlah	82	100,00

## d. Dari 794 IKK diperoleh hasil :

Ukuran	Jumlah IKK	%
• Meningkatkan/Naik	139	17,00
• tetap	491	63,22
• Menurun	160	19,77
jumlah	794	100

- Ukuran "tetap" merupakan ukuran tertinggi yaitu 491 IKK (63,22%). Rasio terbesar terdapat pada Lampiran 1.2. Tataran Pelaksanaan Kebijakan dan lampiran 1.3 Capaian Per Urusan;
- Ukuran "menurun" diurutan kedua yaitu 160 IKK (19,77%). Rasio terbesar terdapat pada lampiran 1.3 Capaian Urusan Wajib dan Pilihan;
- Ukuran "meningkat" diurutan ketiga yaitu 139 IKK (17,00%);

Dapat disimpulkan perkembangan IKK pada LPPD di Provinsi Jawa Tengah dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 dari seluruh lampiran berjumlah 794 IKK dengan indikator pengukuran (meningkat/baik, tetap, menurun) menunjukkan terjadi "penurunan". Ukuran penurunan banyak dipengaruhi pada lampiran 1.2

Pelaksanaan Kebijakan, sehingga perlu ditingkatkan capaian kinerja masing-masing perangkat daerah di tahun berikutnya.

#### C. PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN

Alokasi dana Tugas Pembantuan Tahun 2018 sebesar Rp804.528.128.000,00 yang dilaksanakan oleh 4 Perangkat Daerah, meliputi 8 Program dan 31 Kegiatan, realisasi fisik sebesar 97,64% dan keuangan sebesar 92,83%.

Tugas Pembantuan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 berasal dari 3 Kementerian yaitu: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya serta Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang, serta dari Kementerian Pertanian yang dilaksanakan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Dinas Pertanian dan Perkebunan.

#### D. TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan dilakukan melalui: meningkatkan dan membangun kerjasama antar daerah dan dengan pihak ketiga, pelaksanaan koordinasi dengan instansi vertikal di daerah, pembinaan batas wilayah, pencegahan dan penanggulangan bencana serta penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum yang kesemuanya dilakukan dengan tujuan untuk menjamin kelancaran, keserasian, keterpaduan tugas serta fungsi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerahantara lain :

1. Kegiatan peningkatan kerja sama Pemerintah Daerah dengan Lembaga Pemerintah Dalam Negeri telah menghasilkan sejumlah 42 naskah kerja sama antar daerah, terdiri dari 35 perjanjian teknis, 3 kesepakatan bersama, dan 4 perjanjian kerja sama.
2. Kerjasama Luar Negeri, telah menghasilkan 2 naskah kerjasama terdiri dari : 1 Nota Kesepahaman (MoU) dan 1 Catatan Hasil Pertemuan (MoM).
3. Kegiatan peningkatan kerja sama Pemerintah Daerah dengan Pihak Ketiga telah menghasilkan sejumlah 90 naskah kerja sama, terdiri dari 22 kesepakatan bersama, 4 nota kesepahaman, 61 perjanjian kerja sama, dan 3 addendum Perjanjian kerja sama.

---

#### 4. Koordinasi Dengan Instansi Vertikal di Daerah

##### a. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda)

Rapat Koordinasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Jawa Tengah telah dilaksanakan 4 (empat kali) dan berskala regional dan nasional meliputi kondusivitas wilayah Provinsi Jawa Tengah utamanya terkait menyambut perayaan hari besar keagamaan, ketersediaan dan harga kebutuhan pokok, ketersediaan pasokan BBM dan LPG, kesiapan infrastruktur dan transportasi, pemberantasan pungli di wilayah Provinsi Jawa Tengah.

##### b. Bidang Perhubungan, koordinasi dan fasilitasi guna percepatan pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur strategis terbangun di Jawa Tengah

Fasilitasi percepatan penyelesaian dan operasionalisasi pembangunan Bandara Internasional Ahmad Yani, Bandara Jenderal Besar Soedirman (Wirasaba), Dewadaru dan Ngloram, fasilitasi percepatan Pembangunan jalur ganda lintas selatan jawa antara Purwokerto – Kroya, fasilitasi percepatan Pembangunan jalur ganda lintas selatan jawa antara Kroya – Kutoarjo, fasilitasi percepatan Pembangunan jalur ganda Solo – Kedungbanteng, Fasilitasi percepatan penyelesaian dan operasionalisasi pembangunan infrastruktur Reaktivasi KA dan pengembangan kereta bandara, Fasilitasi percepatan Reaktivasi Jalur KA Lintas Stasiun Semarang Tawang - Pelabuhan Tanjung Emas Semarang; dan fasilitasi percepatan pengembangan alur pelayaran perintis.

##### c. Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral, koordinasi bidang Energi dan Sumber Daya Mineral dilaksanakan dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, PT. Pertamina (Persero) Unit Pemasaran BBM Retail Region IV Semarang, PT. PLN (Persero), Polda Jawa Tengah, Perum Perhutani, Perguruan Tinggi (UNDIP, UGM, UPN, ITB).

##### d. Bidang Pendidikan, koordinasi dilaksanakan dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Agama, Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta, Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan, Badan Standar Nasional Pendidikan, Badan Akreditasi Nasional dan Badan Akreditasi Provinsi, Kejaksaan Tinggi, Polri, TNI, Pramuka, PMI, Kwarda, Badan Koordinasi Sertifikasi Profesi, Badan Pusat Statistik, dan Lembaga serta Organisasi Sosial Kemasyarakatan seperti Aisyiyah, Muslimat NU, Badan Koordinasi Organisasi Wanita.

- e. Bidang Jalan, Jembatan dan Keciaptakaryaan, Pembangunan infrastruktur transportasi yaitu jalan dan jembatan guna mendukung peningkatan aksesibilitas masyarakat serta pembangunan infrastruktur kebutuhan dasar masyarakat yaitu penyediaan air minum dan sanitasi, adalah merupakan bentuk pelayanan oleh Pemerintah Provinsi kepada Rakyat Jawa Tengah sebagai unsur Pembangunan Nasional, fasilitasi dan koordinasi instansi vertikal di daerah dengan Kementerian Pekerjaan Umum.
- f. Bidang Kesehatan, Upaya peningkatan mutu dan akses pelayanan kesehatan masyarakat di Provinsi Jawa Tengah, tidak hanya dilakukan oleh fasilitas pelayanan kesehatan milik Provinsi Jawa Tengah dan kabupaten/kota maupun swasta, namun juga dilaksanakan oleh instansi milik Pusat/vertikal sesuai dengan kewenangan dan fungsi dari instansi vertikal tersebut, antara lain Regionalisasi Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan; Pemberian Perizinan terkait dengan kefarmasian, makanan dan minuman yang diterbitkan di pusat maupun di provinsi; Upaya pencegahan masuknya penyakit menular dari luar daerah/negeri melalui pintu masuk bandara dan pelabuhan; Peningkatan mutu pendidikan kesehatan yang terstandar; Untuk menunjang pelayanan, pengembangan bidang kesehatan.
- g. Kegiatan Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian dilaksanakan bersama Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP3TKI), Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja (BBPLK) Semarang dan Surakarta, dan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) dilaksanakan melalui uji kompetensi dan sertifikasi tenaga kerja, pelayanan penempatan TKI di luar negeri, peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja melalui program pelatihan kerja, penyelesaian masalah TKI yang berhadapan dengan hukum serta peningkatan program transmigrasi melalui fasilitasi perjanjian kerja antar daerah serta pembekalan pelatihan calon transmigrasi.

## 5. Pembinaan Batas Wilayah

### a. Fasilitasi Penegasan Batas Daerah

- 1) Telah terselesaikan penegasan batas daerah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri :
  - a) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 2017 tentang Batas Daerah Kabupaten Sukoharjo dengan Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah.
  - b) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2017 tentang Batas Daerah Kabupaten Magelang dengan Kota Magelang Provinsi Jawa Tengah.
- 2) Telah terdapat kesepakatan penegasan batas antara Kabupaten Temanggung dengan kabupaten Kendal dalam Berita Acara Kesepakatan untuk selanjutnya diterbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang batas daerah Kabupaten Temanggung dengan kabupaten Kendal.
- 3) Fasilitasi pembinaan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan penegasan dan penetapan batas daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah, dari 73 segmen batas antar kabupaten/kota telah diterbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Penegasan Batas Daerah sebanyak 72 segmen dan 1 segmen dalam tahapan proses penerbitan Peraturan Menteri Dalam Negeri

### b. Perapatan dan Perawatan Pilar Batas

- 1) Perapatan pilar batas sebanyak 30 pilar untuk segmen batas Kabupaten Temanggung dengan Kabupaten Wonosobo, 20 pilar untuk segmen batas Kabupaten Demak dengan kabupaten Grobogan.
- 2) Perawatan pilar batas sebanyak 40 pilar untuk perawatan di wilayah Kabupaten Sragen dan 40 pilar untuk perawatan di wilayah Kabupaten Banyumas.

## 6. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana

Kejadian bencana di Jawa Tengah sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 tercatat sebanyak 1.760 kali berupa angin, banjir, kebakaran, erupsi, gempa bumi dan tanah longsor yang menimbulkan kerugian Rp. 51,724 milyar. Bencana yang paling sering terjadi adalah bencana kebakaran 589 kali dan tanah longsor 555 kali. Sementara itu, Kejadian bencana yang menimbulkan kerugian terbesar yaitu kebakaran dengan kerugian Rp39,28 milyar.

Penyelenggaraan penanggulangan bencana di Jawa Tengah didanai melalui mekanisme penyusunan rencana program dan kegiatan dan anggaran di APBD

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Pada tahun 2018 alokasi APBD pada BPBD Provinsi Jawa Tengah adalah sebesar Rp. 37.418.538.000 dengan rincian Rp. 7.810.538.000,- belanja tidak langsung dan Rp. 29.608.000.000,- merupakan belanja langsung, yang terdiri dari 8 program dan 66 kegiatan.

#### 7. Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Dalam Tahun 2017 terjadi aksi unjuk rasa sebanyak 179 kali meliputi permasalahan ideologi/politik sebanyak 24 kali, ekonomi sebanyak 32 kali, sosial 123 kali dan permasalahan-permasalahan yang ada di Jawa Tengah yang berpotensi menjadi sumber konflik sosial diantaranya adalah masalah lahan pertanian masyarakat yang dijadikan tempat untuk latihan TNI AD, sengketa PLTU, rencana pembangunan pabrik semen, serta masalah pendirian tempat ibadah. Sumber dana berasal dari APBD Tahun 2017 sebesar Rp24.543.885.000,00.

#### PENGHARGAAN DARI PEMERINTAH YG DITERIMA OLEH PEMDA DALAM TH 2018

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menerima 74 Penghargaan Tingkat Nasional antara lain :

NO	NAMA PENGHARGAAN	PEMERINTAH PUSAT	SKPD
1	<i>Investment Award</i> dari Pemerintah Pusat sebagai Penyelenggaraan PTSP Provinsi Terbaik Pertama di Indonesia	Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Kementerian Perindustrian	DPMPTSP
2	TOP 10 dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) Tahun 2018 dengan Inovasi SIAP INDEKOST (Sistem Informasi Aplikasi Perizinan Izin Penelitian dari Kamar Kost)		DPMPTSP
3	Penghargaan Menpan RB sebagai Unit Penyelenggara Pelayanan Publik KATEGORI SANGAT BAIK Tahun 2018	KEMENPAN RB	DPMPTSP
4	Provinsi Terbaik dalam Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi dengan predikat BB	KemenPAN-RB	Biro Organisasi
5	Penerima Penghargaan Pemenang Lomba Wana Lestari Tingkat Nasional Tahun 2018		DLHK
6	Penghargaan Kampung Iklim Tahun 2018 Tingkat Nasional		DLHK
7	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah sebagai Mitra Inovasi SDPPI Terbaik 2018 pada ajang Apresiasi Mitra Inovasi SDPPI Kategori Dukungan Penggunaan Perangkat dan Frekuensi Maritim Legal Tingkat Nasional yang		DINLUTKAN

<b>NO</b>	<b>NAMA PENGHARGAAN</b>	<b>PEMERINTAH PUSAT</b>	<b>SKPD</b>
	diselenggarakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika.		
8	Juara III Menu Balita Lomba Masak Serba Ikan Tingkat Nasional ke-16 dalam rangka Hari Ikan Nasional ke-5 yang diselenggarakan Kementerian Kelautan dan Perikanan tanggal 7 Desember 2018 di JCC Senayan Jakarta.		DINLUTKAN
9	Juara III Stand Terbaik Kategori Pemerintah Daerah pada Hari Pangan Sedunia/HPS (World Food Day) Tingkat Nasional ke-36 Tahun 2018 di Provinsi Kalimantan Selatan		DINHANPAN
10	Penghargaan Dari Museum Rekor - Dunia Indonesia atas Pemrakarsa dan Penyelenggara Gelar Kuliner dengan Mobil Niaga Terbanyak		DINKOP
11	Sertifikat Akreditasi Rumah Sakit lulus dengan predikat Paripurna		RSJD Dr.AMINO GONDOHUTOMO Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta
12	Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIH) Terbaik II, kategori pemerintah provinsi.	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) RI	Biro Hukum
13	Pemprov yang seluruh Kab/Kota di Wilayah Binaannya masuk kategori Peduli HAM	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) RI	Biro Hukum
14	Terbaik I Kategori Provinsi Peduli HAM	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) RI	Biro Hukum
15	Nasional procurement Award katagori Komitment LPSE Dalam Penerapan SPSE CA kepada LPSE Pemprov Jateng oleh LKPP		DINKOMINFO
16	Best Communicators 2018 Katagori Gubernur pada Public Relation Award 2018		DINKOMINFO
17	PR Indonesia Award 2018 katagori Terpopuler di Media Subkatagori Provinsi		DINKOMINFO
18	The Best Leader IT Tahun 2018 kepada Gubernur Jawa Tengah dari Data Gov Ai dalam Best IT & Data Tech Governance		DINKOMINFO
19	Pemerintah Daerah dengan Kinerja dan Tata Kelola SANGAT BAIK kepada Pemprov. Jateng Tk. Provinsi oleh Indonesian Institute for Public Governance (IIPG) dalam Penganugrahan Pandu Negeri 2018 IIPG		DINKOMINFO
20	Pemimpin Inovatif Tingkat Provinsi Pada Penganugrahan Pandu Negeri 2018 IIPG kepada Gubernur Jawa Tengah		DINKOMINFO

<b>NO</b>	<b>NAMA PENGHARGAAN</b>	<b>PEMERINTAH PUSAT</b>	<b>SKPD</b>
21	Penghargaan Pemerintah Peduli Penyiaran kepada Pemerintah Prov. Jawa Tengah dari Komisi Penyiaran Indonesia dalam Anugerah KPI 2018		DINKOMINFO
22	Penghargaan Badan Publik Informatif dengan Nilai Terbaik kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dari Komisi Informasi Pusat dalam Penganugerahan Informasi Badan Publik 2018		DINKOMINFO
23	Penghargaan Top 10 Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik 2018 kepada Pemerintah Prov. Jawa Tengah dari Kementerian PAN-RB	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB)	DINKOMINFO
24	Penghargaan Tingkat Nasional Paritrana Terbaik Ke 1 Tahun 2018 dalam perlindungan kepada tenaga kerja melalui BPJS ketenagakerjaan		DISNAKER
25	Penghargaan K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) Tingkat Nasional untuk perusahaan kategori Zero Accident, SMK3, Penanggulangan HIV AIDS di tempat kerja dan Gubernur sebagai Pembina terbaik dari Kementerian Ketenagakerjaan RI.	Kementerian Ketenagakerjaan	DISNAKER
26	Penghargaan Integra 2018 Indeks Prestasi Pembangunan Ketenagakerjaan dari Kementerian Ketenagakerjaan RI.		DISNAKER
27	Penghargaan Dan Terima Kasih Atas Partisipasinya Dalam Penarikan Pekerja Anak Tahun 2018 Kementerian Ketenagakerjaan RI.		DISNAKER
28	Satyalencana Karya Bhakti Praja Nugraha (peringkat III)	Kementerian Dalam Negeri	Biro Pemotdaker
29	OPINI WAJAR TANPA PENGECUALIAN atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2017	BPK RI	BPKAD
30	Terbaik nasional penggerak pengembangan kabupaten/ kota layak anak	Kementerian PPPA RI	DPPPADALDUKKB
31	Penghargaan provinsi dengan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak atau UPTD PPA terbaik	Kementerian PPPA RI	DPPPADALDUKKB
32	Penghargaan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) terbaik nasional se-Jawa-Bali.	Bank Indonesia	
33	Juara I Paritrana Award Tahun 2017 kategori Pemerintah Provinsi	BPJS Kesehatan	Dinas Kesehatan
34	Pemerintah Daerah Terbaik I dalam Bidang Pemanfaatan Teknologi Informasi Penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan dan Pelatihan Dasar CPNS Tahun 2018.	LAN RI	
35	Anugerah Iptek Budhipura 2018	Kementerian Ristek dan Dikti	

<b>NO</b>	<b>NAMA PENGHARGAAN</b>	<b>PEMERINTAH PUSAT</b>	<b>SKPD</b>
36	Penghargaan Top 99 Inovasi Pelayanan Publik	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB)	Si Terpa Daya RSJD Dr. RM. Soedjarwadi
37	Penghargaan Peringkat dan Status Kinerja Pemda Secara Nasional Terbaik	Kemendagri	
38	Penghargaan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan (TLHP) secara tuntas atau 100 persen	Kemendagri	
39	Penghargaan Bapeten (Badan Pengawas Tenaga Nuklir) Safety and Security Award (BSSA) 2018 kategori Pemerintah Daerah	Bapeten	
40	Anugerah Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) 2018	KPI	
41	Pemerintah Provinsi Kualifikasi Informatif dengan nilai terbaik (96,95)	Komisi Informasi Pusat	
42	Top 40 Inovasi Pelayanan Publik 2018 (Piala Anggakara Birawa)	KemenPAN-RB	Si Terpa Daya RSJD Dr. RM. Soedjarwadi
43	Top 10 Pengelolaan Pengaduan Masyarakat	Kemenpan RB	
44	Provinsi Dengan Indikator Utama Kondisi Lingkungan Kerja Terbaik & terbaik ketiga nasional Provinsi dengan Urusan Ketenagakerjaan Besar.	Kementerian Ketenagakerjaan	
45	Predikat Sangat Baik kategori penyelenggara pelayanan publik	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB	
46	Instansi dengan penerapan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Terbaik Tahun 2018.	KPK	Inspektorat
47	Instansi dengan penerapan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Terbaik Tahun 2018 kategori DPRD.	KPK	Inspektorat
48	Kementerian PU PR memberikan penghargaan peringkat dua kategori Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)	Kementerian PU PR	
49	Anugerah Parahita Ekapraya (APE), kategori mentor (ketiga kali)	Kementerian PPPA RI	
50	Anugerah Kencana 2018	Kementerian Kesehatan RI	
51	Survey ulang ISO HACCP/FOOD SAFETY (22000:2007 dari BSI		Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta
52	TOP 3 cerita inovasi International TBLIS, Georgia 'bridging Tiga Sistem (SIM RSMS, BPJS, dan INA-CBG,s)		RSUD Prof. Dr. MARGONO SOEKARJO
53	TOP 20 Kompetensi Inovasi Pelayanan Publik Tingkat Prov.Jateng 'RINDU Sipenjinak Nyeri,		RSUD Prof. Dr. MARGONO

<b>NO</b>	<b>NAMA PENGHARGAAN</b>	<b>PEMERINTAH PUSAT</b>	<b>SKPD</b>
	Penggugah senyum' Jaringan inovasi pelayanan publik provinsi Jawa Tengah tahun 2018		SOEKARJO
54	TOP 15 dari Komite Akreditasi Rumah Sakit Indonesia "Pengaruh Aplikasi TELE APIK terhadap kepatuhan jam pelayanan dokter di poliklinik RSUD Prof.Dr Margono Soekarjo Purwokerto " MAKALAH CALL FOR ABSTRACT (PITSELNAS IV) TAHUN 2018		RSUD Prof. Dr. MARGONO SOEKARJO
55	TOP 50 dari komite akreditasi rumah sakit Indonesia "hubungan Excessive day time Sleepines (EDS) terhadap tingkat Depresi pada pasien Stroke di ruang adenium RSUD Prof.Dr Margono Soekorjo Purwokerto" MAKALAH CALL FOR ABSTRACT (PITSELNAS IV) TAHUN 2018		RSUD Prof. Dr. MARGONO SOEKARJO
56	TOP 50 dari komite akreditasi rumah sakit Indonesia " Efektifitas penerapan clinic pathway untuk menurunkan lama rawat dan biaya rawat pada kasus cedera kepala ringan di RSUD Prof.Dr Margono Soekorjo Purwokerto" MAKALAH CALL FOR ABSTRACT (PITSELNAS IV) TAHUN 2018		RSUD Prof. Dr. MARGONO SOEKARJO
57	TOP 20 dari Komite Akreditasi Rumah Sakit Indonesia "TELE APIK (TEYENG NDELENG ANTRIAN PENDAFTARAN DI HATI PASIEN)" KARS AWARD TAHUN 2018		RSUD Prof. Dr. MARGONO SOEKARJO
58	TOP 20 dari Komite Akreditasi Rumah Sakit Indonesia "NURSE COACH (PERAWAT PENDAMPING DI HATI PASIEN )" KARS AWARD TAHUN 2018		RSUD Prof. Dr. MARGONO SOEKARJO
59	Juara II lomba Posyantek Berprestasi Tingkat Nasional Tahun 2018, posyantek terbaik antar desa Mijen dalam rangka gelar tepat Guna Nasional XX di Bali		Dinas Permadesdukcapil
60	Piagam penghargaan kepada Gubernur Jawa Tengah sebagai kepala Daerah yang melakukan pembinaan POSYANTEK Berprestasi dalam gelar TTG Nasional XX di Bali		Dinas Permadesdukcapil
61	Indonesia Sustainable Tourism Award (ISTA) 2018 Kategori Tata Kelola		Dinas Porapar
62	Sayembara Desain Pusat Cenderamata Pariwisata 2018		Dinas Porapar
63	Anugrah Pesona Indonesia Kategori Festival Terpopuler		Dinas Porapar
64	Indonesia's Attractiveness Award (IAA) 2018, penghargaan di Bidang Investasi Pariwisata		Dinas Porapar
65	Penghargaan atas Provinsi Terbaik dalam Pelaporan dan Pencapaian SPM	Kemenkes RI	Dinas Kesehatan
66	Provinsi Terbaik dalam Pemanfaatan Data dan Litbangkes Nasional Tahun 2018	Kemenkes RI	Dinas Kesehatan

<b>NO</b>	<b>NAMA PENGHARGAAN</b>	<b>PEMERINTAH PUSAT</b>	<b>SKPD</b>
67	Penghargaan Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik kategori Pelayanan Prima Tahun 2018 kepada RSUD Tugurejo Provinsi Jawa Tengah	Kemenpan RB RI	Dinas Kesehatan
68	Penghargaan Efisiensi Energi Nasional (PEEN) Sebagai Juara I Kategori Penghematan Energi dan Air Pemerintah Daerah Tahun 2018		ESDM
69	Juara II Nasional Lomba Daerah Irigasi Permukaan Teladan	Kementerian PUPR Direktorat Jendral Sumber Daya Air	Dinas PU SDA TARU
70	Juara I Nasional OP Irigasi Partisipatif Perkumpulan Petani Pemakai Air	Kementerian PUPR Direktorat Jendral Sumber Daya Air	Dinas PU SDA TARU
71	Juara I Petugas OP Irigasi Permukaan Teladan Tingkat UPTD Tingkat Nasional	Kementerian PUPR Direktorat Jendral Sumber Daya Air	Dinas PU SDA TARU
72	Juara I Nasional Petugas OP Irigasi Permukaan Teladan Tingkat Kemantren	Kementerian PUPR Direktorat Jendral Sumber Daya Air	Dinas PU SDA TARU
73	Juara I Kemantren Peduli Sungai Tingkat Nasional	Kementerian PUPR Direktorat Jendral Sumber Daya Air	Dinas PU SDA TARU
74	Inovasi Penerapan Teknologi Penyelenggaraan Infrastruktur PUPR	Kementerian PUPR Direktorat Jendral Sumber Daya Air	Dinas PU SDA TARU

Secara menyeluruh, pembangunan di Jawa Tengah pada Tahun 2018 mengalami peningkatan yang cukup berarti, namun disadari pula masih banyak permasalahan yang belum ditangani secara optimal karena terkendala dengan aspek lain baik terkait dengan keterbatasan anggaran, SDM maupun regulasi. Tentu saja hal tersebut tidak menyurutkan langkah-langkah yang ditempuh oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk peningkatan pelaksanaan pembangunan di masa yang akan datang.